

**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN DESA
(Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

(Skripsi)

**Oleh
Wayan Ardi Andika**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN DESA (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)

**Oleh
Wayan Ardi Andika**

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan kepala desa Gedung Wani dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Gaya kepemimpinan Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dapat dikategorikan sebagai gaya kepemimpinan partisipatif dalam memimpin rakyatnya. Partisipasi masyarakat dalam membangun desanya sudah baik, hal ini terbukti bahwa saat atau ketika dalam hal keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun demikian masih terdapat kekurangan yaitu kepala desa kurang menggerakkan kepala dusun dalam menggerakkan dan melaksanakan pembangunan desa dan masyarakat belum mengetahui secara luas penggunaan dana desa untuk program-program pembangunan desa.

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa.

ABSTRACT

LEADERSHIP STYLE OF VILLAGE CHAIRMAN IN INCREASING COMMUNITY PARTICIPATION FOR VILLAGE DEVELOPMENT (Study of Gedung Wani, Marga Tiga Subdistrict, East Lampung Regency)

**By
Wayan Ardi Andika**

Community participation not only involves the community in making decisions in every development program, but the community is also involved in identifying problems and potentials in the community. Without community participation every development activity will fail. Whatever the form, participation aims to increase the capacity of everyone who is directly or indirectly involved in a development by involving them in decision-making and subsequent activities. The research objective was to describe the leadership style of the village head of Gedung Wani in increasing community participation for village development. This type of research uses a descriptive type of research with a qualitative approach. Based on the results obtained in this study, it can be concluded that: The leadership style of the Village Head of Gedung Wani, Marga Tiga District, East Lampung Regency can be categorized as a participatory leadership style in leading the people. Community participation in developing their village has been good, this is evident from the time or when in terms of community involvement in the development process. However, there are still shortcomings, namely the village head does not move the hamlet head in mobilizing and implementing village development and the community does not know the widespread use of village funds for village development programs.

Keywords: Leadership Style, Village Head, Community Participation, Village Development.

**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN DESA
(Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh

Wayan Ardi Andika

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN
DESA (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga
Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : **Wayan Ardi Andika**

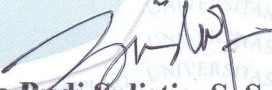
Nomor Pokok Mahasiswa : 1646041024

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

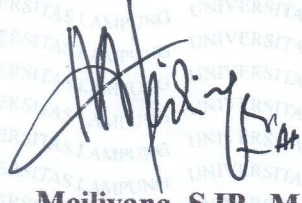
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Bambang Utoyo S, M. Si.
NIP 19630206 198803 1 002


Eko Budi Sulistio, S. Sos., M.AP.
NIP 19780923 200312 1 001

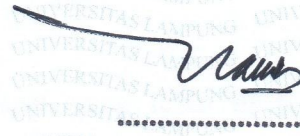
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliyana, S.IP., M. A.
NIP 19740520 200112 2 002

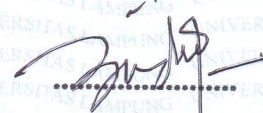
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

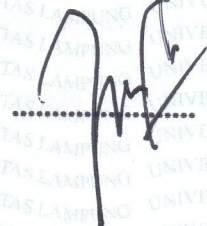
Ketua : **Dr. Bambang Utoyo S, M. Si.**



Sekretaris : **Eko Budi Sulistio, S. Sos., M.AP.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Yulianto, M.S.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **07 Mei 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 04 Mei 2021
Yang membuat pernyataan,



Wayan Ardi Andika
NPM 1646041024

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Wayan Ardi Andika lahir di Gedung Wani 18 Desember 1997. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Made Kartika dan Ibu Kadek Ardani.

Penulis menempuh pendidikan TK di TK PGRI Sukaraja Tiga pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan sekolah dasar di SD Negeri 3 Sukaraja Tiga pada tahun 2004 sampai dengan 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Marga Tiga pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Kemudian menempuh pendidikan SMA di SMA Kristen 1 Metro pada tahun 2013 sampai dengan 2016.

Pada tahun 2016, melalui jalur Mandiri penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa S1 di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik (Fisip) Universitas Lampung (Unila). Sejak awal masa perkuliahan tahun 2016-2017, penulis bergabung di Himagara dan penulis aktif organisasi tingkat universitas bidang keagamaan yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hindu Universitas Lampung.

Kemudian pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2019, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari, di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Timur.

KATA INSPIRASI

“Bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat lebih baik daripada tidak berbuat, dan bahkan tubuhpun tak akan berhasil terpelihara tanpa berkarya”

(Bhagawad Gita, Sloka III, Ayat 8)

“lakukanlah tugasmu dengan baik selanjutnya berserah dirilah pada Tuhan, yakinlah akan keadilan-Nya”

(Yajur Weda 32.2)

“Intelegensia dan keyakinan adalah sepasang dayung yang dapat membantu para bijak mengarungi samudera kehidupan yang penuh tantangan”

(Sama Weda 728)

“Terus kejar segala mimpi dan cita-citamu. Sebesar apapun cita-citamu yakinlah bahwa segala sesuatu yang sudah kamu kejar jangan pernah berhenti. Karena sedetik saja kamu berhenti mengejar, sama saja selangkah kemunduran dari awal keberhasilan mu“

MAJU ASAL MUNDUR TI

(Wayan Ardi Andika)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puja astungkara angayubagia , atas waranugraha Ida Sang

Hyang Whidhi Wasa yang telah melimpahkan Anugrah, hidayah dan

kemudahan-NYA. Kupersembahkan karya ku ini untuk orang-orang yang

kusayangi dan berarti dalam hidupku.

Kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

Ayah dan Ibu

Keluarga dan Adikku

Sahabat-sahabatku

Terima kasih atas semua doa dan dukungan, kebahagiaan, canda dan tawa yang telah menyertai dalam langkahku.

SANWACANA

Rasa angayubagia penulis haturkan ke hadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang telah memberikan *wara nugraha-Nya* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Utoyo S,M.Si. selaku dosen pembimbing utama. Terimakasih bapak atas bimbingan, saran, dan motivasi yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang sekiranya kurang berkenan. Maafkan saya bapak yang terlalu banyak kekurangan, ketidakpahaman, dan merepotkan selama mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Eko Budi Sulistio S.Sos.,M.AP. selaku dosen pembimbing kedua. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih juga atas motivasi, saran, dan bimbingannya yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.

3. Prof Dr. Yulianto, M.S. selaku Dosen penguji utama. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan, masukan maupun saran yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan pada penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, membimbing, dan membantu penulis dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara beserta staff terima kasih banyak atas semua ilmu dan pengetahuan yang telah diajarkan kepada penulis.
8. Segenap informan penelitian di Balai Desa Gedung Wani dan Masyarakat Gedung Wani penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu atas informasi dan juga data-data, bantuan, izin, dan juga waktu luang yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Made Kartika dan Ibu Kadek Ardani yang telah menjadi penyemangat penulis. Terimakasih telah melahirkan, membesarkan, memberikan kasih sayang, cinta, doa, dukungan dan nasihat kepadaku. Semoga kelak aku dapat membahagiakan, membanggakan dan selalu menjadi anak yang berbakti kepada kalian.
10. Adikku tersayang Kadek Arda Saputra yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatanku. Terima kasih untuk tidak pernah berhenti memberikan semangat, doa dan dukungan kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ni Made Lesiana Putri yang telah banyak membantu, mendukung dan menemani dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi seseorang yang selalu ada untukku, baik suka maupun duka. Segala kebaikan yang telah diberikan tidak akan pernah aku lupakan.

12. Sahabat, Kadek Gobeh, Wayan Freda, Sangkur, Toby, Terimakasih atas kegilaannya selama ini tingkatkan lagi kita mancingnya. Tobatlah kau wahai kisanak. Sahabat Kampus Rendito si profesor, Ozza si slow & Livi si gupek. Terimakasih atas segala keceriaan dan bantuannya selama ini.
13. Keluarga besar Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara terutama untuk **Alaska** yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala kerjasama dan kebersamaannya selama proses perkuliahan. Semoga kita semua kelak menuju kesuksesan bersama dengan jalannya masing-masing.
14. Teman-teman Kelompok KKN, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat Periode 2 Tahun 2019. Terimakasih atas kerjasama dan kebersamaannya selama kurang lebih 40 hari.
15. Teman-teman Kelompok PKL Periode 2 Tahun 2020 di Dinas Pekerja Umum Kota Bandar Lampung, terimakasih atas kerjasama dan kebersamaan selama kurang lebih 30 hari melaksanakan PKL.
16. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi dan selama perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan. Penulis ucapkan terima kasih untuk semuanya.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, namun penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasama, doa, dan dukungan semua pihak yang berjasa selama awal penulis menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat Sarjana Administrasi Negara ini. Semoga Tuhan memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan untuk membantu penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung,
Penulis

2021

Wayan Ardi Andika

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepemimpinan	8
2.1.1 Pengertian Kepemimpinan	8
2.1.2 Sebab-Sebab Munculnya Pemimpin	10
2.1.3 Gaya-Gaya Kepemimpinan.....	11
2.1.4 Gaya Kepemimpinan Partisipatif	12
2.2 Kepala Desa	15
2.2.1 Pengertian Kepala Desa	15
2.2.2 Kewenangan Kepala Desa.....	16
2.2.3 Tugas Kepala Desa.....	18
2.3 Partisipasi Masyarakat	19
2.3.1 Pengertian Partisipasi	19
2.3.2 Bentuk Partisipasi	21
2.3.3 Cara Memperkuat Partisipasi Masyarakat	24
2.4 Pembangunan	25
2.4.1 Pengertian Pembangunan	25
2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Desa	29
2.4.3 Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	37

2.4.4	Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Desa	39
2.4.5	Dampak Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa ...	50
III.	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian.....	53
3.2	Fokus Penelitian	54
3.3	Lokasi Penelitian	55
3.4	Sumber data.....	55
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.6	Teknik Analisis Data.....	58
3.7	Teknik Keabsahan Data	59
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Desa Gedung Wani.....	62
4.2	Data Hasil Penelitin.....	70
4.2.1	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Gedung Wani	70
4.2.2	Partisipasi Masyarakat	75
4.3	Pembahasan.....	84
4.3.1	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Gedung Wani	84
4.3.2	Partisipasi Masyarakat	87
V.	ESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	102
5.2	Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan Penelitian.....	57
2. Dokumentasi Penelitian	57
3. Mata Pencaharian Desa Gedung Wani.....	64
4. Keadaan Pendidikan Orang Tua.....	66
5. Tingkat Pendidikan anak di Desa Gedung Wani	66
6. Sarana Ibadah Desa Gedung Wani.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Komponen dalam analisis data.....	59
2. Struktur Organisasi Desa Gedung Wani	67

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah cermin utama sukses tidaknya pemerintahan suatu bangsa. Desa jugalah ujung tombak terselenggaranya pemerintahan di suatu negara. Pemerintah pada Tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni kepala desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala desa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin untuk menjalankan program pembangunan di desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting dan amat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kepemimpinan kepala desa memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan di desa. Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga desa serta penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintahan desa, kepala desa itu dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa sebagai unsur staf dan kepala dusun sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerja tertentu.

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki kehidupan. Seperti yang dikemukakan oleh Riyadi dalam Theresia (2013:2) bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu, termasuk di dalamnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pemahaman partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah. Oleh karena itu, ukuran yang dipakai adalah sejauh mana masyarakat menanggapi, melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat *top down*. Apabila masyarakat tidak patuh dan tidak mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, maka masyarakat akan dianggap tidak berpartisipasi dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Pada pandangan ini sebenarnya masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan, Partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan, untuk mendukung hal tersebut diperlukan gaya kepemimpinan kepala desa yang efektif yang dapat berpengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa (Tumbel, 2018: 3).

Berdasarkan hasil prariset yang dilakukan penulis melalui observasi dan informasi dari masyarakat desa yang dilakukan pada Kamis 12 Maret 2020 di Desa Gedung Wani, sejauh ini pembangunan fisik di Desa Gedung Wani sedang diaktifkan kembali, setelah periode kepemimpinan kepala desa sebelumnya hampir tidak ditemukan pembangunan dalam bidang apapun khususnya pembangunan fisik desa. Meningkatnya tingkat partisipasi warga Desa Gedung Wani tersebut tidak terlepas dari pengaruh kepemimpinan kepala desa itu sendiri. Kepemimpinan merupakan aktivitas seorang pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok (Hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Gedung Wani).

Berdasarkan hasil observasi pra riset yang peneliti lakukan dan informasi dari warga masyarakat Kepala Desa Gedung Wani saat ini terus meningkatkan proses pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Namun pada kenyataannya pembangunan fisik Karena infrastruktur Desa Gedung Wani masih tertinggal terutama dalam infrastruktur jalan. Selain dari pada pembangunan kepala desa Gedung Wani juga menata sistem pemerintahan desa yang sebelumnya tidak aktif seperti lebih sering mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan, membagi kekuasaan yang sesuai tugas dan fungsi dari pada bawahannya dan menata manajemen pemerintahannya.

Kepemimpinan Kepala Desa Gedung Wani dikenal merakyat dan dekat dengan masyarakatnya, hal ini terlihat kepala desa ramah, mudah bergaul dan bersahaja dengan masyarakat yang dipimpinnya. Pencitraan kepemimpinan Kepala Desa

Gedung Wani terus-menerus dibangun sebelum terpilih menjadi kepala desa. Sejak awal kepala desa berusaha ramah, sering membantu dan mudah berteman akrab dengan semua lapisan masyarakat. Sifat tersebut membuat masyarakat simpati dan merasa tertarik dengan kepribadian yang dimiliki kepala desa. Sifat kepala desa yang mampu membuat orang simpatik dan bisa memengaruhi masyarakat mengikuti pemikirannya terus melekat hingga sekarang.

Hasil pengamatan penulis selanjutnya terlihat bahwa di Desa Gedung Wani terjadi perubahan kondisi fisik pada akhir waktu ini dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan fisik desa. Penulis menghubungkan dengan kepemimpinan kepala desa yang menjabat, bahwa memang ada hubungan antara kepemimpinan dengan pembangunan desa. Kegiatan gotong royong di desa ini pun lebih aktif dibandingkan desa-desa tetangga lainnya. Pembangunan fisik desa yang terjadi meliputi perbaikan jalan raya, gorong-gorong, siring atau drainase air, dan tiang jaringan listrik. Perbaikan jalan dilakukan dengan dana ADD pembangunan gorong-gorong dan pos ronda menggunakan dana swadaya masyarakat, kepala desa bersama kepala dusun dan ketua RT untuk membantu pembangunan fisik di desanya. Partisipasi masyarakat dalam bentuk moril atau tenaga dan materil atau iuran merupakan Semua pembangunan fisik Desa Gedung Wani di atas sudah selesai terlaksana karena setiap dana yang digunakan selalu habis pakai.

Alasan pengambilan judul mengenai gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa karena kepemimpinan Kepala Desa sangat dibutuhkan untuk memberikan pengaruh agar

masyarakat peduli dan mau berpartisipasi pada semua program yang ada di desa. Namun pada kenyataannya pemimpin justru sibuk dengan urusan pribadinya dibandingkan dengan dengan urusan rakyatnya, sehingga rakyat enggan untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desanya. Akibatnya pembangunan Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur belum merata.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk pembangunan desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah gaya kepemimpinan kepala desa Gedung Wani dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan kepala desa Gedung Wani dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan dan pengetahuan dalam studi Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan pemerintahan
2. Secara praktis, bagi kepala desa, dapat dijadikan referensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan gaya kepemimpinan kepala desa Gedung Wani dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepemimpinan

2.1.1 Pengertian Kepemimpinan

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan bermacam macam karena perbedaan kebutuhan ini maka manusia saling membutuhkan sehingga diperlukan kerjasama yang melahirkan suatu wadah atau tempat berkumpul maka terciptalah suatu komunitas atau organisasi yang mempunyai tujuan yang sama.

Kreith dan Knicki (dalam Nawawi, 2003:21) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara sukarela. Pengertian ini menekankan pada kemampuan pemimpin yang tidak memaksa dalam menggerakkan anggota organisasi agar mau melakukan pekerjaan/kegiatan yang terarah pada tujuan organisasi. Artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh tauladan yang baik agar dengan sendirinya anggotanya akan mengikutinya.

Terry (dalam Sulistio dan Sulistiowati, 2015: 149), mengatakan kepemimpinan adalah upaya menggunakan berbagai jenis pengaruh yang bukan paksaan untuk memotivasi anggota organisasi agar mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah usaha seorang pemimpin untuk dapat membangkitkan rasa percaya diri anggotanya untuk melakukan sesuatu dengan sukarela pada tujuan tertentu.

Menurut Rivai (2003:21), kepemimpinan adalah seorang pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok.

Tiga aplikasi penting dalam kepemimpinan yaitu:

1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut
2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab serta berkualitas

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat bahwa kepemimpinan menyangkut orang mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu kepemimpinan memerlukan keahlian atau kemampuan agar orang lain dapat digerakkannya. Artinya pemimpin dapat memotivasi bawahannya sehingga bawahan mau bekerja secara sukarela tanpa paksaan.

Kepemimpinan merupakan suatu faktor penentu dalam suatu organisasi, karena kedudukannya penting dan strategis. Siagian (1985: 36) mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan inti manajemen, karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia alat alat lainnya dalam suatu organisasi. Demikian pentingnya peranan kepemimpinan dalam usaha mencapai tujuan organisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses dan kegagalan yang dialami sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang disertai tugas memimpin dalam suatu

organisasi. Setiap komunitas atau organisasi membutuhkan seorang pemimpin yang menjalankan kegiatan kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kelompoknya dengan kata lain seorang pemimpin membutuhkan anggotanya untuk dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Rivai (dalam Sulistio dan Sulistiowati, 2015: 149), pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk menggerakkan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pemimpin tidak bekerja sendiri untuk mencapai tujuan organisasinya, tetapi harus dibantu orang lain dalam hal ini anggotanya, untuk itu pemimpin harus dapat menciptakan suasana yang kondusif di lingkungannya sehingga menghasilkan efisiensi kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disisi lain pemimpin harus menyatu dengan bawahan namun wibawa sebagai seorang pemimpin harus tetap dijaga. Aktualisasi seorang pemimpin adalah menciptakan suasana dan pola kepemimpinan dan diharapkan para bawahan.

2.1.2 Sebab-Sebab Munculnya Pemimpin

Mengenai sebab-sebab munculnya seorang pemimpin para ahli telah menemukan beberapa teori Kartono (2010:29) mengatakan ada tiga teori dalam menjelaskan kemunculan pemimpin yaitu:

1. Teori Genetis, teori ini menyatakan pertama, pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Kedua, dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi yang bagaimanapun juga.

2. Teori sosial, teori ini menyatakan pertama, pemimpin itu harus disiapkan, didik dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Kedua, setiap bisa menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta dorongan oleh kemauan sendiri
3. Teori ekologis, teori ini muncul atas reaksi dari kedua teori di atas yaitu seseorang akan sukses menjadipemimpin apabila sejak lahir dia telah memiliki bakat kepemimpinan dan bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan/ekologisnya

2.1.3 Gaya-Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan menurut pendapat Hasibuan (2007:170) gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Kepemimpinan Otoriter

Kepemimpinan Otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Orientasi kepemimpinannya difokuskan hanya untuk peningkatan produktivitas kerja karyawan dengan kurang memperhatikan perasaan dan kesejahteraan bawahan.

2. Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan Partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar

merasa ikut memiliki perusahaan. Bawahan harus berpartisipasi memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin dengan gaya partisipatif akan mendorong kemampuan bawahan mengambil keputusan. Dengan demikian, pimpinan akan selalu membina bawahan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar.

3. Kepemimpinan Delegatif

Kepemimpinan Delegatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan dengan agak lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada bawahan. Pada prinsipnya pemimpin bersikap menyerahkan dan mengatakan kepada bawahan inilah pekerjaan yang harus saudara kerjakan, saya tidak peduli, terserah saudara bagaimana mengerjakannya asal pekerjaan tersebut bisa diselesaikan

4. Kepemimpinan Demokratis

Gaya ini dikaitkan dengan sikap pemimpin dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2.1.4 Gaya Kepemimpinan Partisipatif

Model kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, karena model kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan dengan tingkat kematangan anak buah. Kepemimpinan partisipatif didefinisikan seorang pemimpin mengikutsertakan anak buah bersama-sama berperan di dalam proses pengambilan keputusan. Model kepemimpinan seperti ini diterapkan apabila

tingkat kematangan anak buah berada pada taraf kematangan moderat sampai tinggi. Mereka mempunyai kemampuan, tetapi kurang memiliki kemauan kerja dan kepercayaan diri.

Kepemimpinan partisipatif didefinisikan sebagai persamaan kekuatan dan sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahan dengan melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan. Kepemimpinan partisipatif berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur keputusan yang memperbolehkan pengaruh orang lain mempengaruhi keputusan pemimpin.

Gaya kepemimpinan partisipatif adalah seorang pemimpin yang mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan (Yukl, 1998:102). Indikator dalam gaya kepemimpinan partisipatif mencakup:

1. Konsultasi kepala desa dengan masyarakat atau tokoh masyarakat
2. Pengambilan keputusan bersama dalam suatu musyawarah desa
3. Membagi kekuasaan antara kepala desa dengan aparat desa lain
4. Desentralisasi dan manajemen yang demokratis yang dilaksanakan oleh kepala desa.

Mitch Mc Crimmon (2007) menulis bahwa menjadi pemimpin yang partisipatif berarti melibatkan anggota tim dalam pembuatan keputusan. Hal ini terutama penting manakala pemikiran kreatif diperlukan untuk memecahkan masalah yang kompleks atau membuat keputusan yang akan berdampak pada anggota tim. Gaya kepemimpinan partisipatif lebih menekankan pada tingginya dukungan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan tetapi sedikit pengarahan. Gaya pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah pengarahan dirujuk sebagai “partisipatif” karena

posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Dengan penggunaan gaya partisipatif ini, pemimpin dan bawahan saling tukar menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan.

Pada aktivitas menjalankan organisasi, pemimpin yang menerapkan gaya ini cenderung berorientasi kepada bawahan dengan mencoba untuk lebih memotivasi bawahan dibandingkan mengawasi mereka dengan ketat. Mereka mendorong para anggota untuk melaksanakan tugas-tugas dengan memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menciptakan suasana persahabatan serta hubungan-hubungan saling mempercayai dan menghormati dengan para anggota kelompok. Persepsi bawahan terhadap gaya kepemimpinan partisipatif adalah cara seorang bawahan memberikan arti atau menilai cara pimpinan bekerja bersama bawahan dengan konsultasi dan dengan mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan.

Agar proses inovasi di desa dapat berjalan dengan baik, kepala desa perlu dan harus bertindak sebagai pemimpin (leader) dan bukan bertindak sebagai bos. Ada perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu, seharusnya kepemimpinan kepala desa harus menghindari terciptanya pola hubungan dengan bawahan yang hanya mengandalkan kekuasaan, dan sebaliknya perlu mengedepankan kerja sama fungsional. Kepala desa juga harus menghindarkan diri dari one man show, sebaliknya harus menekankan pada kerja sama antar teman sepekerjaan, menghindari terciptanya suasana kerja yang serba menakutkan, dan sebaliknya perlu menciptakan keadaan yang membuat semua bawahan percaya diri.

Berdasarkan beberapa konsep teori tersebut penulis menggunakan teori gaya kepemimpinan partisipatif dari (Yukl, 1998:102). Gaya kepemimpinan partisipatif adalah seorang pemimpin yang mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan Adapun aspek-aspek dalam gaya kepemimpinan partisipatif mencakup konsultasi, pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi dan manajemen yang demokratis.

2.2 Kepala Desa

2.2.1 Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa. Kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa yang dapat dilihat dari gaya kepemimpinan kepala desa tersebut (Asshidiqie, 2010: 33).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26-30 dikatakan bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan perwakilan desa. Pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Peraturan Pemerintah tersebut dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dihitung sejak

yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan. Seorang kepala desa hanya boleh menjabat selama dua kali masa jabatan. Pada pelaksanaan tugas dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab kepada kepala desa.

2.2.2 Kewenangan Kepala Desa

Menurut Asshidiqie (2010: 33) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Menurut Asshidiqie (2010: 33) Kepala Desa mempunyai kewajiban

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Secara administratif, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya

2.2.3 Tugas Kepala Desa

Menurut Asshidiqie (2010: 35) berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dijelaskan bahwa:

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa berwenang.
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. Menetapkan peraturan desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

- i. Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk
- j. Sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- k. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- l. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- m. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- o. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- p. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan
- q. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Partisipasi Masyarakat

2.3.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pemerintah, permasyarakatan dan pembangunan.

Mubyarto (dalam Ndaraha, 1987:102) mendefenisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri partisipasi menimbulkan harapan diri dan kemampuan

pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat, dengan kata lain partisipasi adalah bentuk memanusiakan manusia.

Berdasarkan pengertian di atas, partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program dan mengevaluasi program-program. Partisipasi juga berkaitan dengan usaha tergantung untuk meningkatkan kontrol atas sumbernya dan institusi regulasi dalam situasi sosial tertentu, serta membangun kemitraan berdasarkan dialog yang disusun secara bersama.

Secara umum partisipasi dimaknai sebagai proses stakeholders di dalam mempengaruhi dan membagi kontrol atas prakarsa pembangunan dan keputusan dan sumber daya yang mempengaruhi mereka. Rinaldi, M. R. (2016) mengatakan partisipasi adalah penyertaan mental serta emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka pencapaian tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut.

Menurut Davis (dalam Sastroepoetro, 1986:15) partisipasi adalah keterlibatan mental maupun emosional, ini berarti seseorang memberikan pikiran, perasaan dan aspek kejiwaan, sehingga dapat menimbulkan tanggung jawab dalam dirinya. Berdasarkan kedua pendapat di atas terlihat bahwa mereka menyoroti partisipasi dengan lebih menekankan pada aspek kejiwaan. Partisipasi masyarakat khususnya masyarakat desa dibangun oleh landasan nilai-nilai ideal sebagai berikut:

- a. Unsur kesadaran yang lahir dari dalam diri warga masyarakat /desa secara otentik untuk terlibat dalam proses politik dan pembangunan. Nilai inilah yang membedakan partisipasi dengan mobilisasi.
- b. Penempatan diri warga masyarakat sebagai subjek kebijakan dan pembangunan.
- c. Peran-peran aktif yang sifatnya dialogis sehingga menjamin kesetaraan antar warga masyarakat.
- d. Suasana kebersamaan antar warga sebagai bentuk jalinan solidaritas sosial. Oleh karena itu partisipasi didekatkan dengan semangat kebersamaan warga desa, tidak terbatas pada tingkat peran individual semata tetapi bersifat kolektif.
- e. Pelembagaan dan keterlanjutan pembangunan.

Berdasarkan nilai-nilai di atas dapat dipahami bahwa kesadaran yang lahir dalam diri seorang warga masyarakat adalah merupakan modal yang kuat untuk proses pembangunan, karena kesadaran yang timbul tanpa ada paksaan akan menumbuhkan kepercayaan diri yang menyulitkan seseorang untuk dipengaruhi atau dimobilisasi.

2.3.2 Bentuk Partisipasi

Menurut Kumorotomo (1992:136) secara umum corak partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. Partisipasi dalam penelitian (electoral participation). Ini merupakan corak partisipasi yang paling mudah dilihat karena biasanya bersifat rasional. Aktivitas partisipasi massadalamhal ini ditujukan untuk memilih wakil-wakil

rakyat, mengangkat pemimpin, atau menerapkan ideologi pembangunan tertentu.

2. Partisipasi kelompok (group participation) warga Negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencurahkan aspirasi mereka.
3. Kontak warga negara dan pemerintah (citizen government contacting) proses komunikasi dapat terjalin antar warga Negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelpon atau pertemuan secara pribadi. Kontak juga bisa berlangsung dalam pertemuan pertemuan mulaitingkat desa hingga rapat akbar yang melibatkan seluruh warga.
4. Partisipasi warga negara secara langsung dilingkungan pemerintahan. Partisipasi seperti ini mensyaratkan keterlibatan langsung seorang warga Negara di dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Sedangkan Ndraha (1983: 125) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi yakni:

1. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.
2. Partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang menolak, menerima dengan syarat serta menerima sepenuhnya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa segala macam bentuk partisipasi yang bias disajikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di desa.

Terlibatnya masyarakat dalam bentuk partisipasi yang ada maka pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dijalankan karena partisipasi aktif masyarakat dalam segala segi pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta menikmati hasil pembangunan.

Pada pelaksanaan partisipasi, ada beberapa sumbangan yang dapat diberikan masyarakat sebagai sumbangan dalam rangka pencapaian tujuan. Adapun jenis partisipasi itu menurut Hamijoyo (2007:21):

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa.
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan untuk pembangunan
4. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda kegyuban, misalnya koperasi dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa sangat banyak sumbangan yang dapat diberikan masyarakat bagi kemajuan desanya, makanya dituntut peran, Kepala desa untuk dapat merangsang masyarakat untuk dapat berpartisipasi.

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa kaitan partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri adalah sangat erat.

Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pembangunan menunjukkan adanya kemampuan masyarakat untuk hidup mandiri demi memajukan desanya. Tinggal bagaimana lagi pemimpin memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya serta memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat untuk memotivasi agar terlibat dalam pelaksanaan pembangunan.

2.3.3 Cara Memperkuat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan karena merupakan syarat utama dalam kehidupan demokrasi di era ekonomi saat ini, namun semua itu tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa adanya usaha-usaha dari semua pihak terutama peran seorang pemimpin yang memotivasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan.

Partisipasi demikian tidak datang dengan sendirinya. dibutuhkan usaha-usaha untuk menumbuhkannya dengan kemampuan, ketekunan dan waktu. Untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar tersebut, salah satu segi yang perlu mendapat perhatian adalah komunikasi. Menurut Tjokroamidjojo (1986: 227) menyatakan bahwa gagasan-gagasan, kebijaksanaan dan rencana hanya akan mendapat dukungan, bila diketahui kemudian dimengerti, bahwa hal-hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat (kelompok masyarakat).

Menurut Sutoro (2001: 32) ada beberapa strategi untuk memperkuat partisipasi rakyat dalam pembangunan:

1. Mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat partisipasi. Nilai-nilai meliputi kebersamaan dan solidaritas, kesadaran kritis, sensitif terhadap perubahan, peka dan berpihak pada kelompok tertindas.
2. Menghidupkan kembali institusi-institusi volunteer sebagai media kewargaan yang pernah hidup dan berfungsi. Eksistensi dan fungsi kelembagaan ini menjadi pilar nyata partisipasi warga dalam proses pembangunan, seperti keberadaan forum rembung desa.
3. Memfasilitasi terbentuknya asosiasi-asosiasi kewargaan yang baru berbasiskan kepentingan kelompok keagamaan, ekonmomi, profesi, minat, dan hobi, dan politik maupun aspek kultural lainnya.
4. Mengkampanyekan mengenai pentingnya kesadaran inklusif bagi warga desa dalam menyikapi sejumlah perbedaan yang terjadi dengan mempertimbangkan kemajemukan.
5. Memperluas ruang komunikasi publik, yang dimanfaatkan warga desa untuk melakukan kontak-kontak sosial dan kerjasama.

Kelima strategi di atas merupakan jalan penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.

2.4 Pembangunan

2.4.1 Pengertian Pembangunan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “Bangun” yang artinya bangkit. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Ia berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.
2. Penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.

Menurut Siagian (2008: 147) pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Konsep pembangunan yang konseptual dengan pembangunan di Indonesia bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Listyaningsih (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik. Istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigm atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah

proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan.

Menurut Joseph. J. Spengler dalam Listyaningsih (2014:44) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan. Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan politik. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Menurut Joseph banyak para ahli politik yang memberi perhatian terhadap pembangunan politik. Jika dilihat dari tujuannya, pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi dan sebagainya. Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Selanjutnya, menurut Afifuddin (2012:42) hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Rostow dalam Arief Budiman (2010:25) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Menurut Husein Umar (2014:8), pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu melalui pendayagunaan sumberdaya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar

dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan dipertanian dibandingkan di pedesaan.

Pratikno (2012: 119) menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan, perbaikan ataupun pembaharuan kearah yang lebih baik yang dilakukan oleh suatu bangsa atau negara. Sedangkan tujuan pembangunan menurut Todaro (2003: 36), harus berdasarkan pada tiga komponen, yaitu:

1. Kecukupan (*Sustance*)

Berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Dapat diartikan bukan hanya menyangkut makanan melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Jika satu dari sekian banyak kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi maka muncullah kondisi keterbelakangan absolut. Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin bekal guna menghindari segala kesenjangan dan ketidakberdayaan akibat dari kekurangan salah satu dari kebutuhan dasar.

2. Jati diri menjadi manusia seutuhnya

Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik adalah dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghindari diri sendiri untuk merasa pantas dan layak melakukan/mengejar sesuatu yang diinginkan semuanya terangkum dalam jati diri (*self esteem*). Pencarian jati diri bukanlah hal yang sepele, sekali jati diri hilang maka hilanglah segala-galanya. Penyebaran nilai-nilai modern yang bersumber dari negara-negara maju telah mengakibatkan terkikisnya jati diri masyarakat negara berkembang.

3. Kebebasan (*freedom*) dari sikap menghambat

Kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*) diartikan sebagai tegak berdiri tidak diperbudak oleh pengajaran aspek-aspek material. Kebebasan berarti dapat berpikir jernih, terlepas dari ajar dogmatis dan memiliki kemampuan untuk memiliki perilaku yang tersedia. Konsep kebebasan manusia juga melingkupi segenap komponen yang terkandung dalam konsep politik termasuk keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik dan persamaan kesempatan.

2.4.2 Pengertian Pembangunan Desa

Berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada

hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana. Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna. dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsur Trilogi pembangunan tersebut yaitu:
 - a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil.
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. dan
 - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa:

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pembangunan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pasal 81 mengenai Pengawasan Pembangunan Desa:

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.

- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Menurut Siagian (2015:89) pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang ada, ibaratnya menyediakan *support* atau layanan (*service*). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

1. Digunakan bersama-sama (*shared*) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
3. Lebih dipandang sebagai sebuah *service* (*considered a service*), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam *support*, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (*device*) fisik.
4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.
5. Terpisah (*distinct*) dari strktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

Menurut Kuncoro (2010:20), Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Seperti halnya pembangunan infrastruktur di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sangat penting dan dibutuhkan. Dimana permasalahan pembangunan infrastruktur yang peneliti temukan di lapangan bahwasannya pembangunan infrastruktur di Desa Gedung Wani Kecamatan

Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur masih minim sarana dan prasarana infrastrukturnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga pembangunan dibidang infrastruktur sangat diperlukan.

Menurut Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri dalam Ulyani (2013:19) pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu.
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

2.4.3 Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan? Bilamana akan dilakukan? Dan siapa yang akan melakukan? Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena

kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien yang dapat memberikan hasil optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Pada dasarnya perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu: tujuan akhir yang ingin dicapai, sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir, jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk merealisasikannya, orang/organisasi atau badan pelaksanaannya.

Menurut Nickels, McHugh and McHugh dalam Tisnawati Sule dan Saefullah (2010:8) menyebutkan bahwa fungsi manajemen terdiri dari empat fungsi adalah perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), dan pengawasan (*controlling*). Fungsi perencanaan yaitu perencanaan (*planing*) sering kali merupakan pokok dasar tercapainya suatu tujuan. Dan dalam membuat suatu rencana ini, haruslah diberikan kepada pihak yang lebih mengetahui konsep tujuan yang akan dicapai. Di daerah pedesaan dan kelurahan dalam pembuatan dan pelaksanaan sebuah program kerja dalam bidang pembangunan, maka dalam

hal pembuatan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan akan diserahkan pada sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang memiliki statement dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Menurut Riyadi dan Deddy Supriady (2014:7) Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakannya, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi.

2.4.4 Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Desa

Berbicara tentang pembangunan desa, selama ini sebagian diantara kita terlalu terpaku pada pembangunan berskala besar (atau proyek pembangunan) di wilayah pedesaan. Padahal pembangunan desa yang sesungguhnya tidaklah terbatas pada pembangunan berskala “proyek” saja, akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa berbagai proses pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material, sumber daya

manusia) bersumber dari pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari desa.

Sesungguhnya, ada atau tidak ada bantuan pemerintah terhadap desa, denyut nadi kehidupan dan proses pembangunan di desa tetap berjalan. Masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya serta membangun sarana dan prasarana di desa. Namun demikian, tanpa perhatian dan bantuan serta stimulan dari pihak-pihak luar desa dan pemerintah proses pembangunan di desa berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan di desa terkesan lamban dan cenderung terbelakang.

Jika melihat fenomena pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi peristilahan terkait pembangunan desa lebih menonjol "Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)". Dibalik semua itu, persoalan peristilahan tidaklah penting, yang terpenting adalah substansinya terkait pembangunan desa.

Pada dasarnya tujuan dari suatu Negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Dalam

melakukan pembangunan antara Negara yang satu dengan Negara yang lainnya tidak mungkin akan sama. Menurut Iqbal dan Suleman (2010:17-19) ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan antara lain:

1. Kualitas sumber daya manusia

Faktor yang mempengaruhi pembangunan yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan karena manusia mempunyai peranan dalam menciptakan teknologi baru selain mengembangkan teknologi yang sudah ada, serta mengorganisasikan faktor-faktor produksi lainnya. Masalah sumber daya manusia atau dikenal dengan masalah kependudukan banyak berpengaruh kepada hasil pembangunan. Penduduk yang besar dengan luas wilayah yang besar bisa menjadi daya dukung dalam proses pembangunan. Penduduk dengan kualitas sumber daya yang tinggi maka akan mempercepat capaian pembangunan.

Namun sebaliknya jika penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah maka akan menjadi penghambat proses pembangunan. Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, yaitu dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan insentive atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. Kualitas sumber daya manusia merupakan merupakan

komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai.

Manusia yang berkualitas adalah SDM yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang sektor pembangunan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi dapat dengan mudah untuk tercapai.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan pokok utama dalam pembangunan dan pertumbuhan masa depan ekonomi Indonesia. Sudah jelas terlihat dari penelitian ini bahwa banyak kendala berhubungan erat dengan masalah pokok tersebut diatas. Sayangnya, tidak ada cara cepat untuk menanggulangi masalah ini. Dalam jangka pendek, beberapa kegiatan misalnya: identifikasi proyek, dan studi prakelayakan harus dilakukan oleh ahli yang diambil dari luar (pemerintahan). Mitra pembangunan dapat memegang peranan penting dalam pembentukan kapasitas (*capacity building*) dengan cara mengembangkan serta membiayai program transfer pengetahuan dan keahlian.

Mereka harus memusatkan perhatian pada keahlian-keahlian yang berorientasi pada proses dan pengetahuan (*software*), dan mengembangkan keahlian para petugas yang bersangkutan agar dapat memahami bagaimana menggunakan pengetahuan dan keahlian baru tersebut dalam menangani kendala-kendala utama di dalam investasi infrastruktur. Sumber daya manusia yang berkualitas yaitu yang memiliki wawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang sektor pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia terdapat dua poin penting dalam masalah kualitas sumber daya manusia, yaitu:

a. Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk menguatkan kualitas manusia yang berlangsung seumur hidup dengan berpedoman pada pendidikan maka manusia akan dapat maju dan berkembang untuk mencapai kesempurnaan. Pendidikan dapat dikatakan bermutu atau berkualitas jika sudah memenuhi standar artinya produk tersebut harus tepat sesuai dengan tujuan. Pendidikan mempunyai peran penting, karena pendidikan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Seperti pada Negara-negara yang maju umumnya kualitas pendidikan yang baik sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas. Pendidikan yang baik

dapat menghasilkan SDM yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. Kualitas pendidikan disini dapat dilihat dari seberapa tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang karena:

- 1) Pendidikan yang lebih tinggi akan memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan.
- 2) Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.

b. Kemampuan

Kemampuan seseorang bisa diukur dari tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Dengan keterampilan yang ada maka pegawai akan berusaha meningkatkan kualitas hasil kerjanya. Dalam penelitian yang peneliti lakukan maksud dari kemampuan disini yaitu kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa serta pelaksana dari program pembangunan infrastruktur. Kemampuan yang dimiliki oleh aparat dalam bekerja dengan kelompok kerja, yakni baik dalam bekerja sama dengan sesama anggota organisasi atau instansi. Misalnya kemampuan berkomunikasi mengeluarkan ide, pendapat bahkan saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan melaksanakan tugas yang baik, sehingga pembangunan infrastruktur

dapat berjalan dengan lancar dan kemampuan dalam mengembangkan keahlian para petugas yang bersangkutan agar dapat memahami bagaimana menggunakan pengetahuan dan keahlian baru tersebut dalam menangani kendala-kendala utama di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Sumber daya manusia harus dikelola agar memiliki keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dimasa yang akan mendatang, yang memungkinkannya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup material yang layak secara manusiawi. Dengan memiliki keterampilan atau kemampuan tersebut, manusia akan terhindar dari kehidupan yang bersifat konsumtif, karena merupakan sumber daya manusia yang produktif. Kurangnya keterampilan dan kemampuan operasional yang terbatas pada pemerintah daerah telah menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek. Khususnya, keterbatasan kapasitas terlihat lebih nyata di bidang perancangan proyek dan pengembangan, yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan.

2. Sumber Daya Finansial

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember, kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Hal ini dapat dilihat dari:

a. Tingginya biaya pendanaan

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan yaitu menemukan sumber pembiayaan pembangunan yang relative murah. Tingginya biaya pendanaan, juga muncul sebagai permasalahan dalam pembangunan. Sebagaimana dalam pelaksanaan pembangunan di beberapa desa masih mengalami beberapa kendala diantaranya tingginya biaya pendanaan untuk pembelian bahan-bahan material. Sedangkan dana atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga mempengaruhi terhadap pelaksanaan pembangunan menjadi tidak dapat terealisasi semua.

b. Ketidakesesuaian pendanaan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur

Masalah pembangunan akan berjalan lancar dan mencapai tujuannya apabila faktor-faktor yang diperlukan untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut dapat dipenuhi salah satunya yaitu faktor biaya. Dimana kebutuhan akan pembiayaan atau anggaran pembangunan infrastruktur mengalami kenaikan. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur dapat diperoleh melalui APBN/APBD. Namun demikian, seberapa jauh anggaran yang disediakan itu sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan.

3 Masalah Teknis

Masalah Teknis ini yaitu dikatakan sebagai kendala paling mengikat untuk investasi infrastruktur di Indonesia. Meskipun pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk menguntungkan negara dan penduduknya, jelas bahwa dalam kasus Indonesia, ada keengganan dari pihak pemilik tanah swasta

melepaskan tanah mereka untuk kepentingan umum. Permasalahan intinya adalah sebagai berikut:

a. Masalah pembebasan tanah

Masalah inti dari pembebasan tanah bukanlah ketersediaan lahan, melainkan, bagaimana mencapai konsensus tentang harga yang pantas. Negosiasi dilakukan antara pemerintah dan pemilik tanah. Dalam kebanyakan kasus, negosiasi ini sangat panjang dan bertele-tele yang melibatkan pemerintah daerah, pemilik tanah, organisasi non-pemerintah yang menjadi penasehat dari masyarakat yang terkena dampak dan para spekulan tanah yang mencari keuntungan dari kenaikan harga. Ini jelas menimbulkan resiko besar bagi investor swasta yaitu keterlambatan proyek dan pembengkakan biaya. Pembebasan tanah diidentifikasi sebagai faktor kendala yang paling utama atau signifikan bahwa penguasaan lahan untuk proyek infrastruktur cukup mahal.

b. Ketidakefisienan dalam pelaksanaan pembangunan

Efektif merupakan sesuatu hal yang dapat mencapai hasil akhir sesuai dengan waktu yang diinginkan atau ditetapkan sebelumnya. Dalam hal keefektifan pelaksanaan pembangunan disini artinya dalam waktu penyelesaian pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

4. Tata kelola pemerintahan

Kegagalan tata kelola juga termasuk minimnya pengawasan atas peran aparat-aparat pemerintahan. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin rendah. Hingga saat ini reformasi

birokrasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan di seluruh Tanah Air. Hal ini dapat kita lihat dari:

a. Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat baik dalam perencanaan dan memberikan sumbangan-sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan serta pada saat pelaksanaan itu sendiri. Dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi daerahnya sendiri, sehingga perkembangan yang mereka harapkan benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa dilihat dari tingkat daftar kehadiran masyarakat dalam melaksanakan gotong royong dan juga dapat kita lihat pada kegiatan rapat bulanan.

b. Transparansi dalam lembaga pemerintahan

Transparansi yaitu terbuka, keterbukaan. Maksudnya adalah segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, kegiatan desa, dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparansi berarti pemerintah desa pro-aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa beserta penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan desa. Transparansi penyelenggaraan kegiatan masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat. Transparansi antara lain dilakukan melalui penyebaran informasi pelaksanaan dan program secara akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan tersebut harus dipasang di papan pengumuman yang berada di kantor desa, sehingga warga dapat mengetahui anggaran digunakan untuk apa saja. Pemerintahan desa yang transparan juga harus melibatkan warga desa secara aktif dalam hal musyawarah dan penyaluran anggaran untuk pembangunan desa tersebut. Dengan pemerintahan desa yang transparan, maka anggaran yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak terjadi kecurigaan antara warga terhadap perangkat desa. Warga desa perlu mengetahui bagaimana kinerja perangkat desa dengan kata lain transparan dalam hal anggaran untuk pembangunan desa yang lebih maju. Struktur organisasi pun harus dibuat dengan benar sehingga semua perangkat desa menjalankan tugas yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi dalam aturan

Konsisten yaitu tetap, tidak berubah-ubah. Maksudnya dalam menetapkan suatu gagasan atau keputusan tidak berubah-ubah. Dengan memiliki sifat yang konsisten diyakini bahwa segala pekerjaan yang sedang dilakukan akan membuahkan hasil yang maksimal. Konsistensi dalam aturan ini dapat dilihat dari penerapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tidak berubah dari rencana atau perencanaan awal yang telah disepakati pada saat musyawarah desa bersama perangkat desa, Dusun, RT RW, Pemuka masyarakat dan BPD.

Pratikno (2012: 120) menyatakan bahwa pembangunan desa melalui peningkatan partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan swadaya. Membangun untuk mendidik agar masyarakat mampu membantu mereka sendiri, tidak selalu bergantung pada bantuan bantuan yang membuat ketergantungan. Akses sumber daya alam (bumi, air, hutan,dan lain-lain) pada hakekatnya adalah untuk masyarakat, merupakan suatu hak yang sangat mendasar, karena sumber daya inilah yang menjadi sumber mata pencaharian warga untuk mencukupi kehidupannya. Pengelolaan sumber daya hendaknya berbasis masyarakat tidak hanya terbatas pada pelibatan masyarakat tetapi harus mengakomodir pandangan-pandangan, pendapat masyarakat setempat.

Berdasarkan sekian banyak permasalahan yang harus dibenahi demi tercapainya pembangunan masyarakat, partisipasi mereka dalam proses pembangunan adalah sangat dibutuhkan, karena salah bukti pembangunan yang telah berhasil adalah ketika partisipasi masyarakat terlihat dalam pembangunan. Partisipasi warga yang sangat tinggi, tingkat kepedulian yang besar akan menjadi modal utama dalam menyelesaikan tujuan pembangunan.

2.4.5 Dampak Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa

Menurut Kartono (2010:31) kepemimpinan dapat memberikan dampak terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan atau partisipasi anggota dalam suatu organisasi, karena apabila seorang pemimpin baik dalam menjalankan tugasnya, maka dengan sendirinya anggotanya akan percaya dan rasa simpati akan timbul

seiring berjalannya roda organisasi yang semakin baik. Organisasi yang berjalan dengan baik, otomatis dukungan serta partisipasi masyarakatpun akan semakin tinggi, dan sebaliknya apabila pemimpin tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka rasa simpati anggota dan tingkat partisipasi anggota akan semakin rendah dikarenakan ketidakpercayaan anggota kepada pemimpinnya. Demikian juga kepemimpinan kepala desa dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kepala desa selaku pemimpin di desa seharusnya selalu dekat atau terus berhubungan dengan masyarakat, dari hubungan tersebut akan timbul kerjasama antara pemimpin dengan yang dipimpin karena saling membutuhkan, dengan demikian akan timbul rasa tanggung jawab disertai keinginan untuk turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desanya.

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Kartono (2010:31), ada beberapa hal penting mengenai konsepsi persyaratan kepemimpinan:

1. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberi wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu
2. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu membawahi atau mengatur orang lain.
3. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa sebagai seorang pemimpin, kepala desa harus mempunyai kemampuan yang lebih dari masyarakatnya, dan juga kewibawaan agar masyarakat dapat menghormatinya dan bertindak dengan kerelaan tanpa ada rasa takut. Kepala desa harus orang yang benar-benar mampu mengetahui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan berusaha mengupayakan kegiatan yang dikehendaki masyarakat. Sehingga akan tercipta peluang yang besar bagi masyarakat untuk bersedia turut serta dalam memberikan partisipasinya.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan sebuah fenomena yang sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, yaitu data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2017:4). Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya, Kirk dan Miller dalam Moleong (2017:4).

Penelitian ini menggambarkan objek gaya kepemimpinan kepala desa Gedung Wani dengan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan informan atau narasumber yang

berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal utama dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2017:93) yaitu bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti. Masalah penelitian bertumpu sebuah fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada didalam penelitian kualitatif dimana fokus penelitian berisikan tentang pokok masalah yang bersifat umum. Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari lapangan. Fokus penelitian yaitu gaya kepemimpinan kepala desa Gedung Wani dengan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa, dengan indikator:

1. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Gedung Wani
 - a. Pengambilan keputusan
 - b. Pembagian kekuasaan
 - c. Kedekatan dengan masyarakat
2. Partisipasi Masyarakat
 - a. Partisipasi buah pikiran
 - b. Partisipasi tenaga
 - c. Partisipasi harta benda
 - d. Partisipasi keterampilan
 - e. Partisipasi sosial

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Penelitian ini berlokasi Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

3.4 Sumber data

Pengertian data sendiri merupakan suatu catatan dari kumpulan fakta yang ada, dapat berbentuk kata, angka maupun lainnya. Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data Moleong (2017:157-158). Data primer yang didapatkan oleh peneliti bersumber dari lapangan penelitian baik dari metode wawancara dan hasil observasi kepada informan. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan adanya panduan wawancara dengan tujuan mengetahui, menganalisis tentang gaya kepemimpinan kepala desa Gedung Wani dengan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori. Data yang diperoleh dari sekunder tidak perlu diolah lagi. Data sekunder yang digunakan pada

penelitian ini berupa data mengenai gambaran umum tempat penelitian yaitu Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dan Peraturan Perundangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut pendapat Nasution dalam Sugiyono (2018:226) observasi dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi yang dikenal dengan observer dan objek yang diobservasi dengan mendeskripsikan penerapan Gaya kepemimpinan kepala desa Gedung Wani dengan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa. Beberapa observasi yang dilakukan peneliti adalah:

- a. Melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
- b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dalam rangka meningkatkan partisipaso masyarakat.

c. Melakukan pengamatan terhadap gaya kepemimpinan kepala desa Gedung Wani dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.

2. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan datang langsung ke Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dengan informan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Parwoto	Kepala Desa Gedung Wani
2	Hariyanto	Sekretaris Desa Gedung Wani
3	Badriyah	Sekretaris Desa Gedung Wani
4	Wagiran	Kaur Pembangunan Desa Gedung Wani
5	Sidiq Mustofa	Kaur Pemerintah Desa Gedung Wani
6	Kuncoro	Kaur Umum Desa Gedung Wani
7	Santa	Tokoh Agama Desa Gedung Wani
8	Ketut Suteja	Masyarakat Desa Gedung Wani
9	Parwoto	Masyarakat Desa Gedung Wani
10	Siti Zaenab	Masyarakat Desa Gedung Wani

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

3. Dokumentasi

Dokumentasi berbentuk tulisan gambar/karya monumentasi dari seseorang yang merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen berbentuk arsip-arsip yang dimiliki Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 3.2 Dokumentasi Penelitian

No	Dokumen
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2	Monografi Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur
3	Struktur Organisasi Perangkat Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur
4	Dokumentasi wawancara dengan informan penelitian

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2018:226) menyatakan data yang diperoleh secara akurat dan objektif menjadi tujuan utama dalam penelitian, analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dan telaah pustaka dan analisis pertanyaan Berdasarkan hasil wawancara kepada informan. Peneliti mengacu pada beberapa tahapan teknik analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak untuk itu diperlukan dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam hal ini peneliti melakukan pemilihan data yang telah didapatkan dari lapangan yang dapat diperlukan berdasarkan fokus penelitian dengan batasan data yang ada dalam panduan wawancara yang telah dibuat.

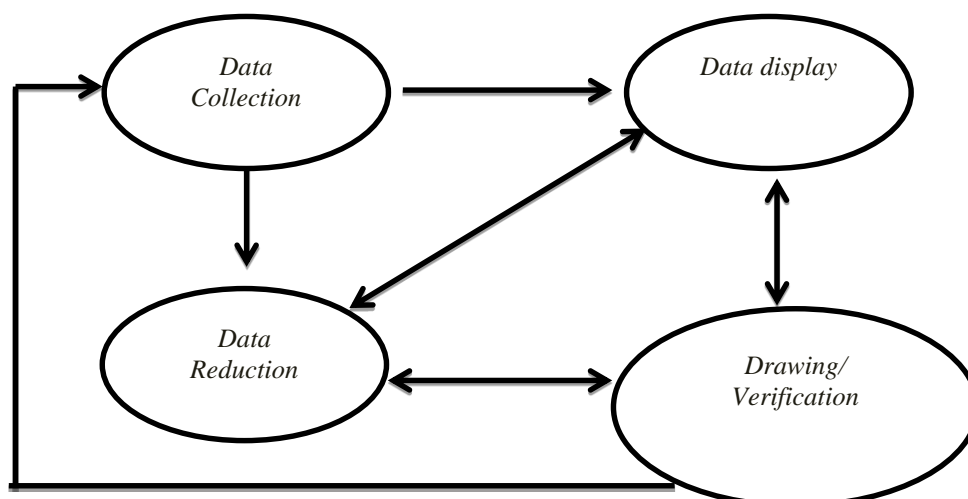
2. Penyajian Data

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambar secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informan yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan dilakukan dengan teks naratif, foto dan gambar sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data selanjutnya. Penelitian ini mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan jenis data primer dan sekunder sehingga diperoleh jawaban tentang penerapan setelah adanya gaya kepemimpinan kepala desa Gedung Wani dengan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa. Berikut ini bagan teknik analisis data berdasarkan model komponen analisis data:

Gambar 1. Komponen dalam analisis data



(Sumber: Sugiyono, 2018:89)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik terakhir dalam penelitian ini adalah teknik keabsahan data dimana menurut Sugiyono (2018:267) Teknik keabsahan data merupakan standar validitas yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kredibilitas

Triangulasi digunakan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan kejadian sebenarnya saat melakukan observasi dan ditambah dokumentasi. Triangulasi disajikan dengan menampilkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi (Sugiyono, 2013: 332). Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, analisis kasus negatif dan melakukan triangulasi data dengan teknik derajat kepercayaan (*credibility*) yang dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Peneliti melakukan pengecekan data melalui berbagai sumber dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintah, Kaur Umum, Tokoh Agama dan beberapa perwakilan masyarakat Desa Gedung Wani

2. Uji Keteralihan

Uji keteralihan merupakan membuat laporan, peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian. Bila pembaca laporan penelitian

memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam suatu hasil penelitian dapat diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar.

3. Uji Kebergantungan

Uji kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Penelitian ini perlu diuji kebergantungannya dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing.

4. Uji Kepastian

Dalam penelitian kualitatif, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan sehingga pengujinya dapat dilakukan secara bersamaan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian. Dalam penelitian ini jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Pada penelitian ini uji kepastian dilakukan bersama dengan uji kebergantungan namun terdapat perbedaan, perbedaan terletak pada orientasi penilaiannya. Uji kepastian digunakan untuk menilai proses penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Gaya kepemimpinan Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dapat dikategorikan sebagai gaya kepemimpinan partisipatif dalam memimpin rakyatnya, yang mencakup konsultasi antara kepala desa dengan masyarakatnya, pengambilan keputusan bersama dengan masyarakat khususnya dalam pembangunan, membagi kekuasaan terutama dalam tahap pembangunan, desentralisasi dan manajemen yang demokratis melalui musyawarah desa.
2. Partisipasi masyarakat dalam membangun desanya sudah baik, hal ini terbukti bahwa saat atau ketika dalam hal keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
3. Namun demikian masih terdapat kekurangan yaitu kepala desa kurang menggerakkan kepala dusun dalam menggerakkan dan melaksanakan pembangunan desa dan masyarakat belum mengetahui secara luas penggunaan dana desa untuk program-program pembangunan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi kepala desa, diharapkan gaya kepemimpinan yang telah diterapkan di lingkungan masyarakatnya lebih ditingkatkan, hal ini karena gaya kepemimpinan Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur memberikan pengaruh positif yang sangat nyata terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Untuk itu kepala desa dapat menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif sehingga partisipasi masyarakat meningkat.
2. Diharapkan kepada Kepala Desa membuat tim khusus dan memberikan arahan kepada Kepala Dusun untuk mengevaluasi dan mengawasi pembangunan desa.
3. Diharapkan kepada Masyarakat desa sebaiknya memantau penggunaan dana yang digunakan untuk program pembangunan desa, dengan cara mengikuti musyawarah desa yang dilaksanakan pemerintah desa untuk menjelaskan dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly (2010) *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Farid, M. (2019). *Analisis Kepemimpinan Penghulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Kepenghuluan Sungai Segajah Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hamijoyo. 2007. *Partisipasi dalam Pembangunan*. Jakarta:Depdikbud RI.
- Hasanah, I. A. (2015). *Hubungan Antaralingkungan Kerja Dengan Produktivitas Kerja Guru di Madrasah Aliyah Negeri 7 Jombang* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Hasibuan. Malayu. (2007). *Manajemen*. Edisi II BPFE UGM. Yogyakarta.
- Kartono, Kartini. (2010). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT. Raja. Grafindo Persada. Jakarta
- Kumorotomo, Wahyudi (1992) *Etika Administrasi Negara*. Ed. 1 Cet 2. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Islami, L. N. (2019). Partisipasi Masyarakat untuk pembangunan desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. *SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Fakultas Ilmu Sosial UM*.
- Lista Nurhayati. (2014). *Pengaruh Kepemimpinan Dan Komunikasi Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat untuk pembangunan desa Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai*. Journal article Pendidikan Ekonomi
- Moleong, J. Lexy (2017) *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya Bandung.
- McCrimmon, M. (2007). *What is Management? How management differs from leadership*.
- Nawawi, Hadari. (2003). *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta Edisi 2: Gajah Mada Unisity Press

- Ndraha, Talizidhuhu. (1983). *Pembangunan masyarakat desa*. Jakarta: Rireba Cipta.
- Pratikno, Riyono (2012). *Keuangan Daerah: Manajemen dan Kebijakan*, MAP-UGM, Yogyakarta.
- Rinaldi, M. R. (2016). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Sripendowo Terhadap Partisipasi Masyarakat untuk pembangunan desa*. Jurnal Penelitian.
- Rivai, Veithzal. (2003) *Kepemimpinan dan perilaku Organisasi*. Rajawali Press Jakarta
- Sastroepoetro, Santoso (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam. Pembangunan Nasional*. Bandung: PT Alumni.
- Siagian P. Sondang (1985). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian P. Sondang (2008). *Teori dan Praktek Kepemimpinan Edisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Eko Budi dan Sulistiowati, Rahayu (2015). *Azas-Azas Manajemen*, Aura Publishing, Bandar Lampung.
- Sutoro, Eko (2001) *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Theresia, Aprilia (2013) *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.
- Todaro, Michael P (2003) *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro (1986) *Pengantar Administrasi pembangunan*, LP3ES,. Jakarta.
- Tumbel, Satria Mentari (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal PSP Pascasarjana UNSRAT.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yukl, G.A. (1998). *Leadership in Organizations*. New Jersey: Prentice Hall.